

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945; Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Fokusmedia, Bandung, 2009.
- A.Muchtar Ghazali Abdul Majid, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016.
- Anwar C , *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi ; Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intans Publishing, Malang, 2011.
- Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Fajrurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003.

- H.M Thalbah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia ; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Khaelan,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Media Insani, Solo, 2003.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.

Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

b. Jurnal

Ah. Mujib Rohmat, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume Iii No. 2 Mei - Agustus 2016.

Asri Agustiwi, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia, *Journal : RECHSTAAT* Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014.

Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2), 2005.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2013.

Putu Ayu Anastasia Wierdarini, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018.

R.Nazriyah, Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (2017).

Yusmiati, Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 4.No.1, 2018.

Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, ResearchGate.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

d. Risalah Sidang

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.

e. Data Elektronik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> di Akses Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 17:55 Wib.

<http://digilib.unila.ac.id/12948/16/BAB%20III.pdf> (dikases pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 12.30 WIB)

Jimly Asshiddiqie, “Lembaga Negara” dalam <http://www.jimly.com/pemikiran/view/13> (diakses tanggal 30 November 2019)

Lembaga Negara Sebelum Dan Sesudah Amandemen Yang Ke-4, https://www.academia.edu/6539169/LEMBAGA_NEGARA_SEBELUM_DAN_SESUDAH_AMANDEMEN_YANG_KE (diakses tanggal 30 November 2019)

“Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara” dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alatnegara>, diakses tanggal 30 November 2019.

Ratna Puspita, Ketua MPR Merekomendasikan GBHN Dikembalikan, dikutip dari <https://nasional.republika.co.id/berita/pwf6f5428/ketua-mpr-rekomendasikan-gbhn-dikembalikan> (diakses pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 14.10 WIB)

Rocket Manajemen, *Pengertian Negara Hukum*, Unsur, dan Cirinya, <http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

Sigid Kurniawan, dengan judul Kritik Mahfud Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/16145191/ini-kritik-mahfud-md-terhadap-wacana-amandemen-uud-1945> (diakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 pukul 17.10 WIB)

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 11 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan agenda Persiapan Penyusunan

Tsarina Maharani, Tambah 3 Pimpinan, MPR Usul Tambahan Anggaran 2019 Rp 350 Miliar, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4055794/tambah-3-pimpinan-mpr-usul-tambahan-anggaran-2019-rp-350-miliar> (diakses pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB).

Widayati, Rekonstruksi Lembaga MPR, disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional, dikutip dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5668/12.Widayanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB).

Widayati, Rekonstruksi Kelembagaan MPR, dikutip dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5668/12.Widayanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 1 Desember 2019)

Yana Musdaliva, Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen, dikutip <https://gurupkn.com/struktur-lembaga-negara> (diakses pada tanggal 30 November 2019).